

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi program promosi penanaman modal di Kabupaten Banyumas belum optimal dalam mengurangi tingkat pengangguran. Perinciannya dari aspek-aspek yang dikaji sebagai berikut:

5.1.1. Organisasi (pengorganisasian)

Secara kelembagaan, aktivitas pembagian tugas dan wewenang antara Bappedalitbang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berjalan dengan jelas dan mendukung pelaksanaan program dalam menjamin pengurangan tingkat pengangguran, serta didukung sarana prasarana yang memadai. Namun, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam kemampuan bahasa asing dan teknologi informasi. Selain itu, koordinasi antarinstansi belum mengarah pada strategi penciptaan lapangan kerja, sehingga tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap dampak investasi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi belum diikuti penurunan tingkat pengangguran secara signifikan.

5.1.2. Interpretasi (pemahaman)

Pemahaman pelaksana terhadap tujuan program promosi penanaman modal sebagai upaya pengentasan pengangguran telah berjalan dengan baik dan selaras antarinstansi, yang tercermin melalui berbagai kegiatan promosi dan komunikasi dengan calon investor. Namun demikian, meskipun telah didukung oleh pedoman teknis berupa SOP, pelaksanaannya masih cenderung kaku dan berorientasi pada kepatuhan prosedural, sehingga kurang mendorong inovasi dalam strategi promosi. Kondisi ini mengindikasikan upaya yang dilakukan belum cukup adaptif dalam menarik investasi, khususnya sektor padat karya, sehingga tujuan program dalam mengurangi tingkat pengangguran belum tercapai secara optimal.

5.1.3. Aplikasi (penerapan)

Berbagai aktivitas promosi investasi yang telah dilakukan di Kabupaten Banyumas belum optimal dalam mengentaskan pengangguran. Hal ini ditandai dengan tidak adanya target dan indikator kinerja yang jelas serta evaluasi yang belum melibatkan Bappedalitbang secara optimal, sehingga pelaksanaan program masih berorientasi pada kegiatan daripada hasil. Selain itu, struktur investasi yang didominasi sektor UMKM dan industri padat modal, pembatasan kawasan industri padat karya, serta karakteristik ekonomi daerah dan keterbatasan aksesibilitas menyebabkan daya serap tenaga kerja rendah. Akibatnya, meskipun investasi meningkat, tingkat pengangguran belum menurun secara konsisten.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka implikasi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1. Organisasi (pengorganisasian)

Perlunya mempertahankan kejelasan pembagian tugas dan wewenang antarinstansi sebagai dasar koordinasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan kompetensi pelaksana dalam penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan promosi investasi. Selain itu, mekanisme koordinasi perlu direformulasi agar lebih berorientasi pada hasil, khususnya dalam mengaitkan antara investasi yang masuk dengan penciptaan lapangan kerja, sehingga tidak hanya berfokus pada capaian investasi, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.

5.2.2. Interpretasi (pemahaman)

Perlunya mempertahankan keselarasan pemahaman pelaksana terhadap tujuan program melalui penguatan forum koordinasi rutin dan komunikasi internal antar perangkat daerah. Selain itu, meskipun ketersediaan pedoman teknis berupa SOP telah memberikan kepastian prosedural, diperlukan evaluasi secara berkala agar tetap adaptif terhadap dinamika investasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga SOP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung pencapaian tujuan program.

5.2.3. Aplikasi (penerapan)

Perlunya penguatan sinergi antara perencanaan dan evaluasi lintas instansi agar pelaksanaan promosi investasi tidak hanya bersifat kegiatan, tetapi lebih terarah pada sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Selain itu, rendahnya penyerapan tenaga kerja akibat dominasi investasi padat modal dan keterbatasan kawasan industri menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan tata ruang agar lebih mendukung pengembangan industri padat karya. Di samping itu, pengembangan infrastruktur serta penguatan branding daerah sebagai kawasan potensial industri perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.

